

ANALISIS *FRAMING* SEBUAH KONFLIK ANTARBUDAYA DI MEDIA

Tuti Widiastuti

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bakrie
Kampus Universitas Bakrie
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: 021-526 1448 ext. 247, Faks: 021-526 3191
E-mail: tuti.widiastuti@bakrie.ac.id

Abstrak

Masalah utama antarmanusia di abad ke-20 adalah kebencian yang ditekankan kepada anggota dari budaya dan kelompok ras yang berbeda. Kebencian pada budaya dan kelompok ras yang berbeda tampak pada polarisasi komunikasi antarbudaya. Komunikasi merupakan medium di mana konflik diciptakan dan diatasi. Ketika melakukan komunikasi dengan orang-orang dari budaya lain, maka identitas sosial lebih memegang peranan penting. Pada saat mengobservasi tingkah laku orang lain, orang berusaha untuk membuat atribusi mengenai efek lingkungan pada tingkah laku mereka dengan penjelasan tingkah laku individu, yang berdasar pada stereotip dan prasangka yang diperparah dengan adanya etnosentrisme. Bahayanya, penilaian yang cenderung mengedepankan etnosentrisme sering kali salah, semena-mena dan tidak ada dasarnya sama sekali. Dalam masyarakat yang semakin individual dan heterogen ini, media memainkan peranan penting sebagai salah satu atau bahkan satu-satunya sumber sosialisasi dari realitas sosial di masyarakat. Alih-alih membentuk realitas obyektif di masyarakat, media bahkan memelihara dan menginstitusikan kenyataan subyektif berdasarkan stereotip yang berkembang di masyarakat, dan bukan yang obyektif.

Kata kunci: konflik antarbudaya, budaya individualistik, budaya kolektivistik, etnosentrisme, stereotip dan prasangka

Abstract

The main interpersonal problem in the twentieth century is hatred which is emphasized to members from different culture and race. It's observable through the polarization of intercultural communication. Communication is a medium where conflict is created and handled. When we communicate with people from different cultures, then social identity takes a more dominant role. When we observe others behavior, we attempt to create attribution about environmental effect to their behavior within individual behavior explanation, that is based on stereotype and prejudice which is worsened by the existence of ethnocentrism. The hazard of this is the prejudice within ethnocentrism is frequently dangerous and moreover incorrect, careless and based with no basic explanation. Recently our society has become more individualistic and heterogenic, and then media plays major core role as one or even the only one source of socialization by giving social reality in the community. Instead of establishing an objective reality in society, media maintains and institutionalizes subjective reality based on stereotype and not based on objective reality.

Keywords: intercultural conflict, individualistic cultural, collectivistic cultural, ethnocentrism, stereotype and prejudice

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku yang memiliki ciri dan kekhasan budaya masing-masing. Aneka ragam suku yang ada bukan suatu hal yang mudah untuk dipahami dan bukanlah suatu hal yang mudah untuk diseragamkan begitu saja. Sifat masyarakat Indonesia yang heterogen atau multikultur ini rentan terhadap kemungkinan terjadinya berbagai konflik antarbudaya di dalamnya. Dengan kata lain dapat dikatakan faktor perbedaan budaya, potensial untuk menimbulkan kesalahpahaman, pertentangan, perselisihan, pertikaian, peperangan, bahkan tidak mustahil juga menjadi pemicu dan memegang peranan penting bagi munculnya konflik antarbudaya tersebut.

Menurut Kriesberg (1973), pengertian konflik sosial yaitu hubungan dua atau lebih pihak yang memiliki keyakinan bahwa mereka masing-masing mempunyai tujuan berbeda. Konflik antarbudaya pada dasarnya sama dengan definisi sebelumnya, hanya ditambahkan faktor bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya berasal dari latar belakang budaya berbeda. Dan budaya merupakan hal yang paling berperan di dalam perbedaan antara kedua belah pihak (dalam Sunarwinadi, 2007 : 1). Karena pada kenyataannya karakter budaya cenderung memperkenalkan seseorang kepada pengalaman-pengalaman yang berbeda sehingga membawa kepada persepsi yang berbeda-beda atas dunia eksternal.

Di Indonesia sering terjadi konflik yang utamanya disebabkan oleh perbedaan budaya, di antaranya pertikaian etnis seperti Madura, Makassar, Banten, Dayak, Melayu di Kalimantan Barat, dan suku-suku di Papua. Bahkan kini, konflikpun terjadi dalam berbagai lapisan sosial di masyarakat, dengan tidak memandang perbedaan etnis sebagai dasar masalah. Masalah yang kini muncul adalah adanya kecenderungan berbagai pihak memandang budaya yang tercermin dalam tradisi suatu kelompok dianggap lebih baik dibandingkan dengan tradisi kelompok lainnya, yang bisa menimbulkan etnosentrisme kelompok.

Misalnya kasus yang sedang hangat dibicarakan dalam media yaitu kasus kematian praja Cliff Muntu di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Tradisi melengkapi masyarakat dengan suatu tatanan mental yang berpengaruh kuat atas sistem moral untuk menilai apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Suatu budaya diekspresikan dalam tradisi, tradisi yang memberikan para anggotanya suatu rasa memiliki dalam suatu keunikan budaya. Tradisi juga dimiliki oleh suatu organisasi sipil, militer, agama dan suatu kelompok masyarakat. Tradisi merupakan norma dan prosedur yang harus ditaati bersama, juga harus menyesuaikan dengan perkembangan jaman, pengetahuan dan teknologi menuju terciptanya budaya global. Perbedaan-perbedaan tradisi dengan segala keunikannya, merupakan pemicu “benturan budaya”.

Dalam kenyataan kehidupan seperti ini, sejatinya konflik antarbudaya dalam masyarakat Indonesia seharusnya mudah diselesaikan. Namun demikian pada kenyataannya justru tak terkendalikan dan berubah menjadi sebuah “perang wacana” di media. Perang wacana antarkepentingan terjadi karena masing-masing pihak merasa bahwa wacana merekalah yang dianggap paling benar. Dalam upaya untuk memahami konflik yang terjadi dalam tradisi pembinaan praja di IPDN, beberapa konsep komunikasi antarbudaya dapat digunakan untuk menelusuri akar permasalahan, antara lain dengan menjelaskan konsep mengenai *ingroup vs outgroup*, prasangka dan stereotip, dan variabilitas kebudayaan.

Kasus meninggalnya praja Cliff Muntu seperti mengulang sejarah tewasnya beberapa praja IPDN pada tahun-tahun sebelumnya. Peristiwa ini mengingatkan semua bahwa ada suatu masalah yang belum diselesaikan dengan tuntas di antara sekian banyak masalah-masalah lainnya yang juga belum terselesaikan. Kasus kematian praja IPDN bisa dikategorikan ke dalam konflik antarbudaya karena dianggap

komunitas IPDN memiliki budaya sendiri dalam mendidik praja-praja mereka yang berbeda caranya dengan budaya lembaga pendidikan lainnya.

Sebuah lembaga pendidikan yang dibangun untuk menciptakan tenaga pemerintahan yang profesional, sebaliknya malah dijadikan sebagai arena untuk menciptakan dan memelihara tradisi kekerasan. Misalnya tradisi yang diberi nama “Wahana Bina Praja” disebut-sebut sebagai salah satu wahana pemelihara kekerasan di lembaga tersebut. Wahana Bina Praja adalah kegiatan yang dilakukan praja IPDN dengan mengacu pada sistem pemerintahan. Di sana ada gubernur, wali kota, bupati, hingga kepala desa. Mereka biasanya bertanggung jawab terhadap kelompok, sesuai hierarkinya, sedangkan mereka yang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan dianggap masyarakat biasa.

Pada prakteknya justru kegiatan-kegiatan pembinaan praja ini bisa disalahartikan oleh beberapa pihak yang mengambil keuntungan dari posisi dan kemampuannya dalam kelompok-kelompok tersebut. Misalnya menerapkan tradisi-tradisi yang mensyariatkan junior harus patuh pada senior, layaknya sebuah institusi militer, dan menjadikan praja junior sebagai pihak yang diperlakukan sebagaimana atasan memperlakukan bawahan dengan semena-mena seperti praja junior menjadi korban pukulan dan tendangan seniornya. Tentu saja praktek-praktek seperti ini rawan untuk disalahgunakan, yang dapat berakibat pada kekerasan fisik dan bahkan kematian.

Maraknya pemberitaan di media mengenai kasus-kasus kekerasan yang berakibat pada kematian beberapa praja IPDN, menimbulkan amarah publik yang tidak setuju dengan tradisi-tradisi kekerasan di lembaga pendidikan. Hal ini berlanjut pada munculnya konflik dalam masyarakat. Merujuk pada pendapat Gurr (1980, dalam Mendatu, 2009 : 1) mengenai tindakan kolektif, maka konflik di sini khusus dimaksudkan dalam konteks sosial, bukan yang menyangkut tujuan dan motivasi pribadi. Karakteristik konflik sosial, yaitu:

1. konflik selalu terjadi dalam masyarakat apapun,
2. dominasi konflik sosial sebagai subyek dalam berita media, dan
3. asumsi bahwa media massa memainkan peranan penting dalam perkembangan dan pengaturan tentang konflik sosial.

Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu ‘*com*’ artinya bersama-sama, dan ‘*fligere*’ yang artinya menyerang. Dengan kata lain diartikan sebagai “bersama-sama (saling) menyerang”. Konflik pada kenyataannya merupakan suatu hal yang terjadi apabila ada dua atau lebih kepentingan yang saling berbenturan dalam pencapaian tujuan masing-masing. Keadaan berbenturan ini dapat dinyatakan secara terbuka (eksplisit) maupun secara terselubung (implisit). Olsen (1978, dalam Sunarwinadi, 1999) menyatakan bahwa konflik terjadi dari sumber *expressive* atau *instrumental*. *Expressive conflicts* berasal dari keinginan untuk melepaskan ketegangan, biasanya berasal dari perasaan bermusuhan. *Instrumental conflicts* sebaliknya, berasal dari tujuan atau praktek yang berbeda.

Berdasarkan asal kata konflik di atas, dalam konteks antarbudaya: konflik didefinisikan sebagai ketidakcocokan antara nilai, ekspektasi, proses-proses atau hasilnya, baik yang dipersepsikan maupun aktual, antara dua atau lebih pihak yang berbeda kebudayaannya mengenai masalah-masalah substantif maupun relasional. Konflik antarbudaya ini biasanya diawali dengan misinterpretasi dan miskomunikasi antarbudaya, yang disebabkan oleh adanya perbedaan kebudayaan tadi. Kebudayaan di sini diartikan sebagai suatu sistem pengetahuan, makna dan pola tindakan simbolik yang dimiliki bersama oleh mayoritas anggota suatu kelompok masyarakat (Sunarwinadi, 1999 : 1).

Konflik antarbudaya ini didefinisikan oleh Samuel P. Huntington (1993, dalam Rifai, 2006 : 2) sebagai benturan antarperadaban yang dikatakan olehnya akan mendominasi politik global. Mengutip artikel yang dituliskannya:

“Identitas peradaban akan semakin penting pada masa akan datang, konflik yang paling penting ada di masa akan datang yang terjadi di antara garis budaya yang memisahkan satu peradaban dengan yang lain”.

Ellie Wiesel, peraih hadiah Nobel Perdamaian, percaya bahwa masalah utama antarmanusia di abad ke-20 adalah kebencian yang ditekankan kepada anggota dari budaya dan kelompok ras yang berbeda, sebagaimana pada anggota politik dan ideologi yang berbeda. Kebencian pada budaya dan kelompok ras yang berbeda tampak pada polarisasi komunikasi antarbudaya. Polarisasi komunikasi terjadi ketika komunikator tidak memiliki kemampuan untuk meyakini atau mempertimbangkan secara serius pendapat seseorang sebagai suatu yang salah dan opini yang lainnya sebagai sesuatu yang benar. Polarisasi komunikasi kemudian ada ketika kelompok atau individu melihat kepentingannya sendiri dan memiliki sedikit atau tidak sama sekali perhatian pada kepentingan orang lain.

Komunikasi merupakan medium dimana konflik diciptakan dan diatasi. Roloff (1987, dalam Sunarwinadi, 1999) mengelompokkan berbagai sumber yang dapat menjadi konflik, yaitu: Pertama, konflik terjadi ketika orang salah menginterpretasikan perilaku satu sama lain. Kedua, konflik muncul dari persepsi yang tidak sesuai. Ketiga, konflik muncul ketika orang tidak setuju pada sebab-sebab perilaku dirinya sendiri atau orang lain.

Tinjauan Pustaka

Teori Konflik

Teori-teori mengenai berbagai penyebab konflik dinyatakan oleh Simon Fisher, dkk. (2001) dalam bukunya berjudul *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak* (www.tempo.co.id), yaitu:

1. Teori Hubungan Masyarakat

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu

masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, dan mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

2. Teori Negosiasi Prinsip

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap, dan melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

3. Teori Kebutuhan Manusia

Berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia—fisik, mental, dan sosial—yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, dan agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

4. Teori Identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai

teori ini adalah melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka, dan meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

5. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, dan meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

6. Teori Transformasi Konflik

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik, dan mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

Coser (1965) dan Dahrendorf (1959) (www.tempo.co.id) menyatakan bahwa konflik sosial pada kenyataannya memiliki fungsi adaptif bagi masyarakat untuk memungkinkan terjadinya perubahan sosial, yang biasanya memberikan tantangan-tantangan bagi institusi dan keyakinan yang ada dan telah mapan. Misalnya konflik di dalam sistem dapat mengerahkan pada pembaharuan norma lama

dan penciptaan norma baru, sedangkan konflik dengan kelompok luar dapat memperlambat batas-batas sosial dan meningkatkan kohesivitas.

Terdapat asumsi bahwa ada hubungan antara konflik eksternal dan konflik internal. Salah satu hipotesis umum tentang hubungan *ingroup* dan *outgroup* menawarkan bahwa konflik eksternal mengurangi ketegangan konflik internal. Belum ada konsensus mengenai hal ini namun ilmuwan telah sependapat bahwa hal ini merupakan masalah penting untuk diteliti (Sunarwinadi, 2007 : 2).

Ingroup vs. Outgroup

Ingroup atau kelompok-dalam adalah kelompok manusia dengan siapa seseorang mau bekerja sama tanpa pamrih, dan terpisah dari siapa yang mengarah pada ketidaknyamanan atau rasa sakit sekalipun. *Outgroup* atau kelompok-luar adalah kelompok manusia mengenai kepada siapa seseorang tidak peduli kesejahteraannya, dan kelompok dengan siapa seseorang mengharapkan imbalan yang setimpal dalam bekerja sama (Triandis, 1988 : 75).

Beberapa konsekuensi dari formasi *ingroup* dan *outgroup*, yaitu :

1. Seseorang cenderung mengharapkan anggota kelompok untuk berperilaku dan berpikir sama dengan apa yang dilakukan (Tajfel, 1969).
2. Sebagai anggota *ingroup*, seseorang cenderung menempatkan kelompok dalam posisi yang menguntungkan dalam komparasi dengan *outgroup* (Brewer, 1979).
3. Orang kurang merasa cemas dalam berinteraksi dengan anggota kelompoknya daripada interaksi dengan anggota *outgroup* (Stephan & Stephan, 1985).
4. Orang cenderung lebih akurat dalam memprediksi perilaku anggota *ingroup* daripada memprediksi perilaku anggota *outgroup* (Gudykunst, 1995).

Berdasarkan pengertian dan konsekuensi dari formasi *ingroup* dan *outgroup* (Gudykunst

& Kim, 1992 : 112-118), orang sering kali menganggap pandangan positif yang berlebihan kepada *ingroup*-nya dan sebaliknya mengesampingkan *outgroup* secara berlebihan pula. *Ingroup* merupakan kelompok sosial dimana seseorang merasa sama satu dengan yang lainnya. Kelompok sosial adalah dua atau lebih individu yang berbagi indentifikasi sosial yang sama di antara mereka atau menganggap diri mereka sebagai anggota dari kategori sosial yang sama (Turner, 1982). Dalam kelompok sosial terdapat interaksi di antara anggotanya yang melibatkan proses kategorisasi sosial yaitu aturan dalam lingkungan sosial mengenai pengelompokan orang dalam sebuah aturan perilaku yang masuk akal bagi individu (Tajfel, 1978). Kategori sosial kemudian akan menentukan pola perilaku anggota kelompok sosial tertentu yang pada akhirnya akan membentuk identitas sosial kelompok tersebut.

Identitas adalah perbedaan cara orang memandang diri sendiri. Menurut J.C. Turner (1987), identitas seseorang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: Pertama, sebagai manusia yaitu identitas sebagai makhluk ciptaan yang terkait dengan manusia lainnya, misalnya identitas terkait dengan identitas laki-laki dan perempuan dalam budaya. Kedua, sebagai makhluk sosial yaitu berdasarkan peran yang dimainkan seperti sebagai pelajar, profesor atau orang tua. Ketiga, sebagai personal yaitu menggambarkan keunikan seseorang sebagai individu dalam kelompok seperti kebangsaan, etnis, jender, atau usia. Identitas pribadi merupakan konsep diri individu yang unik satu sama lain. Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya mengenai keanggotaan kelompok sosial yang terkait dengan nilai dan emosi yang signifikan yang ada pada keanggotaan tersebut (Tajfel, 1978).

Deaux (1991, dalam Gudykunst & Kim : 112-118) menyatakan bahwa identitas sosial memiliki dua dimensi yang berbeda, yaitu *voluntary-involuntary*, dan *desirable-undesirable*. *Voluntary identity* adalah suatu identitas yang dapat dipilih, seperti kelompok

profesi, agama, ideology, sementara *involuntary identity* adalah suatu identitas dimana seseorang tidak mempunyai keleluasaan untuk memilih seperti kelompok ras, etnis, keluarga, umur, jender, dan lain sebagainya. *Diserable identities* adalah suatu identitas yang dianggap positif, dan *undisirable identities* adalah suatu identitas yang dianggap negatif. Identitas sosial seseorang relatif konsisten dari waktu ke waktu.

Ting-Toomey (1989, dalam Gudykunst & Kim, 1992 : 112-118) mengemukakan empat kemungkinan pilihan untuk hubungan antara bagaimana identitas individu dengan kelompok dan cara mereka berperilaku, yaitu: a) individu bisa jadi melihat diri mereka sebagai tipikal anggota kelompok dan berperilaku secara khas, b) individu bisa jadi melihat diri sendiri sebagai anggota kelompok yang khas dan berperilaku tidak secara khas, c) individu bisa jadi melihat diri sendiri sebagai anggota kelompok yang tidak khas dan berperilaku secara tidak khas, dan d) individu bisa jadi melihat diri sendiri sebagai anggota kelompok yang tidak khas dan berperilaku secara khas.

Ketika melakukan komunikasi dengan orang-orang dari budaya lain, maka identitas sosial lebih memegang peranan penting. Kelley (1967) berpendapat ketika mengobservasi tingkah laku orang lain, orang berusaha untuk membuat atribusi mengenai efek lingkungan pada tingkah laku mereka dengan penjelasan tingkah laku individu. Atribusi sosial perhatian pada bagaimana anggota sebuah kelompok sosial menjelaskan tingkah laku sebagaimana anggota kelompoknya dan anggota dari kelompok sosial lain. Hewstone dan Jaspars berpendapat bahwa seseorang menjunjung identitas sosialnya ketika ia membuat atribusi sosial. Atribusi sosial seseorang didasarkan pada stereotip sosial dan juga etnosentrisme.

Mengenai atribusi sosial, Ehrenhaus (1983) menyatakan bahwa tipe atribusi seseorang membuat budaya individualistik dan kolektivistik berbeda. Anggota dari budaya kolektivistik sensitif pada ciri dan penjelasan situasional, dan cenderung mengatribusikan

perilaku orang lain pada konteks, situasi, atau faktor eksternal lain individu. Anggota budaya individualistik, sebaliknya, sensitif pada karakteristik disposisional dan cenderung untuk mengatribusikan perilaku orang lain untuk mengkarakteristikan internal individu (misalnya kepribadian). Atribusi sosial yang berdasar pada stereotip dan etnosentrisme bisa memunculkan apa yang dinamakan kelompok minoritas yaitu sekelompok orang yang tersingkirkan karena perbedaannya dengan kebanyakan anggota kelompok sosial yang ada.

Variabilitas Kebudayaan

Dengan melihat dimensi dari variabilitas budaya, masyarakat Indonesia dapat

dikategorikan sebagai masyarakat kolektivisme dibandingkan dengan individualisme. Menurut Gudykunst dan Kim, dalam budaya individualistik dan kolektivistik dimensi variabilitas kebudayaan digunakan untuk menjelaskan komunikasi antarbudaya. Komunikasi *low-context* mendominasi model komunikasi dalam budaya individualistik. Dan komunikasi *high-context* mendominasi model komunikasi dalam budaya kolektivistik. Pengaruh budaya individualisme-kolektivisme pada komunikasi dimediasi oleh kepribadian, nilai, dan konsep diri yang dimilikinya.

Secara ringkas perbedaan karakteristik utama budaya individualistik dan budaya kolektivistik, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Karakteristik Budaya Individualistik dan Kolektivistik

Individualistik	Kolektivistik
Karakteristik Utama	
Menekankan tujuan individual Realisasi pribadi Berbeda tipis antara komunikasi <i>ingroup</i> dan <i>outgroup</i> Konsep diri independen Identitas "I" Mengatakan apa yang dipikirkan Komunikasi <i>low-contexts</i> seperti langsung, tepat, dan mutlak	Menekankan pada tujuan <i>ingroup</i> Menyesuaikan diri dengan <i>ingroup</i> Berbeda jauh antara komunikasi <i>ingroup</i> dan <i>outgroup</i> Konsep diri interdependen Identitas "We" Menghindari konfrontasi dalam <i>ingroup</i> Komunikasi <i>high-context</i> seperti tidak langsung, tidak tepat, dan berandai-andai

(Sumber: Triandis, dalam Gudykunst & Kim, 1992 : 69-81)

Dalam masyarakat dengan budaya yang bersifat kolektivistik, setiap perilaku anggota diatur berdasarkan norma dan aturan yang disepakati bersama. Budaya kolektivistik menekankan unsur *structural tightness* yang fokus pada norma, aturan, dan membatasi budaya pada perilaku anggotanya. Norma didefinisikan sebagai petunjuk perilaku berdasarkan kode moral. Aturan (*rules*) didefinisikan sebagai petunjuk perilaku tidak berdasarkan kode moral (Olsen, 1978). Dalam *tight cultural*, norma dan *rules* budaya cenderung jelas dan orang diharapkan

mengikutinya (Pelto, 1968).

Triandis (1994, dalam Gudykunst & Kim 1992, 69 : 81) menyatakan bahwa homogenitas budaya (kesamaan orang) cenderung mengarahkan *structural tightness*. Sedangkan Mosel (1973) menyatakan bahwa lebih mudah memprediksi dalam *tight social structure* daripada dalam *loose social structure*. *Structural tightness* pada akhirnya dapat digunakan dalam memprediksi lawan bicara, sehingga efektivitas komunikasi dapat tercapai.

Yang uniknya, masyarakat Indonesia di satu sisi kerap dikatakan sebagai masyarakat yang bersifat kolektivistik karena terdiri atas beragam suku budaya yang bersumber pada budaya daerah masing-masing dimana pola perilaku masing-masing anggotanya diatur sedemikian rupa berdasarkan identitas sosial kelompoknya. Di lain sisi, pada suatu masyarakat di daerah tertentu dan dalam kondisi tertentu di Indonesia, dapat pula dikatakan sebagai masyarakat yang sifatnya individualistik. Karena terdiri atas latar belakang agama, keyakinan, kepentingan, dan sistem nilai yang berbeda, maka ciri-ciri kolektivistik biasanya akan memudar. Misalnya saja ketika seseorang yang menganut ideologi tertentu dihadapkan pada solidaritas kelompok untuk turut berkonflik dengan orang dari kelompok lain, kemudian dia menolaknya dengan alasan konflik antarkelompok tersebut tidak sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai yang diyakininya.

Keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang merupakan "sikap" yang

diwujudkan melalui perilaku. Sikap atau *attitude* adalah predisposisi yang dipelajari untuk respon dalam evaluatif tingkah laku (dari sangat menyenangkan sampai sangat tidak menyenangkan) pada beberapa objek (Davidson & Thompson, 1980). Sikap memengaruhi seseorang untuk berperilaku dalam tingkah laku yang positif atau negatif pada beberapa objek atau manusia. Sikap umumnya dikonseptualisasikan memiliki tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif (McGuire, 1969). Komponen kognitif meliputi kepercayaan mengenai objek sikap. Komponen afektif sikap meliputi emosional atau reaksi evaluatif pada objek sikap. Komponen konatif dari sikap meliputi maksud tindakan pada objek sikap.

Ting-Toomey (1985, dalam Gudykunst & Kim, 1992 : 119-132) membedakan kondisi konflik pada budaya individualistik dan kolektivistik, yang merupakan cerminan sikap anggota masyarakat dari masing-masing budaya tersebut mengenai konflik, yaitu:

Tabel 2. Sikap Masyarakat dari Budaya Individualistik dan Kolektivistik terhadap Konflik

Individualistik	Kolektivistik
- Menganggap konflik sifatnya instrumental	- Lebih menganggap konflik yang sifatnya <i>expressive</i>
- Memisahkan isu konflik dari orang yang terlibat dalam konflik	- Tidak memisahkan isu konflik dengan orangnya
- Konflik terjadi jika ekspektasi individu mengenai perilaku yang pantas dilanggar	- Konflik terjadi jika ekspektasi normatif kelompok pada perilaku dilanggar
- Konteks kurang penting karena informasi lebih banyak terdapat dalam pesan	- Konteks memainkan peran yang penting dalam menciptakan makna pada pesan komunikasi
- Lebih menyukai konfrontasi, sikap langsung pada konflik	- Tidak menyukai konfrontasi, sikap tidak langsung pada konflik
- Penafsiran pribadi memandu pengaturan konflik	- Penafsiran antarpribadi saling memengaruhi pengaturan konflik
- Mengutamakan pengaturan konflik untuk jangka pendek	- Mengutamakan pengaturan konflik untuk jangka panjang
- Kurang menyukai penggunaan mediator	- Lebih menyukai penggunaan mediator
- Mediator formal, seperti pengacara	- Mediator informal, seperti kepala suku
- Memakai metode <i>factual-inductive</i> dan <i>axiomatic-deductive</i> dalam menyelesaikan konflik	- Lebih menyukai metode <i>affective-intuitive</i> dalam menyelesaikan konflik

(Sumber: Ting-Toomey, dalam Gudykunst & Kim, 1992 : 119-132)

Ting-Toomey (1988) memprediksikan konflik di antara budaya yang berbeda berdasarkan lima gaya konflik dari Rahim (1983; yang berdasar pada derajat perhatian pada diri sendiri dan orang lain yang melekat pada cara individu mencoba untuk mengatasi konflik), yaitu:

1. *integrating style*, yaitu meliputi perhatian yang tinggi pada diri sendiri dan orang lain;
2. *compromising style*, yaitu meliputi level perhatian yang moderat pada diri sendiri dan pada orang lain;
3. *dominating style*, yaitu merefleksikan perhatian yang tinggi pada diri sendiri dan perhatian yang rendah pada orang lain;
4. *obliging style*, yaitu perhatian rendah pada diri sendiri dan perhatian yang tinggi pada orang lain; dan
5. *avoiding style*, yaitu perhatian yang rendah pada diri sendiri dan pada orang lain.

Dalam budaya kolektivistik, ada kecenderungan perhatian yang tinggi pada diri sendiri dan pada orang lain (*integrating style*). Besarnya perhatian kepada orang lain, umumnya dikarenakan orang dalam budaya kolektivistik menemukan perbedaan antara perilakunya dengan perilaku orang yang diamati berdasarkan kategorisasi kelompoknya. Apabila tindakan mengamati tersebut tidak disenangani atau dianggap sebagai sikap menantang oleh orang yang diamati, maka dapat menimbulkan emosi.

Matsumoto (1991) secara teoritis menghubungkan individualisme-kolektivisme dan jarak kekuasaan untuk mengekspresikan emosi. Menurutnya, anggota kelompok budaya kolektivistik akan menekankan tampilan emosional untuk memfasilitasi kerjasama kelompok, harmoni, dan kepaduan daripada pada anggota budaya individualistik. Selain itu menurut Matsumoto (1991), anggota budaya individualistik menampilkan lebih besar variasi perilaku emosional daripada anggota budaya kolektivistik. Budaya kolektivistik tidak mentolerir besarnya variasi individu, dan tidak menyukai variasi emosi. Anggota budaya

kolektivistik menghindari keakraban dengan orang lain. Selain itu orang dalam budaya jarak kekuasaan yang tinggi akan menampilkan emosi untuk mempertahankan perbedaan status.

Pada masyarakat yang memiliki budaya kolektivistik seperti kebanyakan tipe masyarakat di Indonesia, menganggap konflik sebagai *expressive conflicts* yaitu keinginan untuk melepaskan ketegangan, biasanya berasal dari perasaan bermusuhan, tidak bisa membedakan antara masalah dengan orang yang terlibat konflik. Konflik bisa jadi dipicu karena aturan *ingroup* dilanggar oleh *outgroup*, sehingga sering kali konflik tidak hanya melibatkan dua orang saja tapi konflik melibatkan dua kelompok yang berbeda dimana penafsiran antarpribadi memengaruhi pengaturan konflik. Dalam hal ini konteks di mana konflik terjadi memainkan peranan penting.

Dalam hal ini konflik sifatnya implisit dibandingkan eksplisit. Masalah konflik lebih bersifat laten daripada manifes, yang apabila dipicu oleh sedikit kesalahan saja dapat berakibat fatal bagi seluruh sendi pemersatu masyarakat. Rusaknya tatanan pemersatu masyarakat yang berbeda budaya ini berimplikasi pada berlarut-larutnya penyelesaian konflik. Oleh karenanya untuk menjembatani dua kelompok budaya yang berbeda diperlukan mediator yang mampu memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang berbeda ini. Mediator yang diminati oleh masyarakat budaya kolektivistik yaitu yang sifatnya informal, seperti kepala suku, ketua adat, pemuka masyarakat, dan tokoh agama. Karena umumnya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah yang sifatnya musyawarah dan kekeluargaan, dibandingkan dengan menggunakan jalur hukum formal seperti melalui pengadilan. Sehingga penyelesaian masalah pun lebih menyukai yang cenderung menggunakan pesan-pesan emosional atau afeksi (*effective-intuitive style*).

Namun demikian sebagai catatan, individualisme-kolektivisme dan jarak kekuasaan tidak secara langsung memengaruhi tampilan emosi, tapi lebih memengaruhi cara

orang menilai situasi dimana mereka mengekspresikan emosinya. Persepsi situasi, pada gilirannya akan memengaruhi tampilan emosi. Jika seseorang secara kaku memegang teguh etnosentrisme dan stereotip dan tanpa mau mempertanyakannya, ia tidak akan pernah membuat prediksi psikokultural secara tepat mengenai perilaku orang lain, atribusinya mengenai perilaku individu orang lain akan terus tidak tepat, dan emosi akan mendominasi penilaiannya terhadap perilaku orang lain.

Etnosentrisme, Stereotip dan Prasangka

Kata *ethnocentrism* berasal dari kata Yunani: '*ethnos*' atau '*natio*', dan '*kentron*' atau '*center*'. Summer (1940, dalam Gudykunst & Kim, 1992 : 382) mendefinisikan etnosentrisme sebagai teknik pemberian nama untuk cara pandang dimana kelompok seseorang merupakan pusat dari segalanya, dan semua yang lain diukur dan dirata-rata berdasarkan hal tersebut. Fakta yang paling penting adalah bahwa etnosentrisme mengarahkan orang pada melebih-lebihkan dan memperhebat segala sesuatunya dalam cerita mereka yang tidak umum dan yang berbeda dengan yang lainnya. Etnosentrisme dapat menciptakan prasangka yang berlebihan dan stereotip yang cenderung negatif pada *outgroup*.

Prasangka atau *prejudice* berasal dari kata Latin '*praejudicium*' yang artinya 'preseden' atau 'penilaian berdasarkan keputusan dan pengalaman sebelumnya' (Allport, 1954, dalam Gudykunst & Kim, 1992 : 384). Allport mendefinisikan negatif '*ethnic prejudice*' sebagai sebuah antipati berdasarkan kesalahan dan generalisasi yang tidak fleksibel. Smith, di lain sisi melihat prasangka sebagai sebuah emosi, prasangka adalah emosi sosial yang dilekatkan pada identitas sosial seseorang.

Prasangka merupakan suatu konsep yang lebih luas dari stereotip. Dengan berprasangka terhadap suatu kelompok, maka seseorang telah memiliki semacam pra-penilaian sebelum ia mengenal orang tersebut lebih dalam lagi. Prapenilaian ini pun sifatnya tidak mudah

berubah, sekalipun ada informasi atau pengetahuan baru yang kontradiktif dengan apa yang diyakininya semula. Prasangka dibentuk melalui proses sosialisasi stereotip negatif yang sudah terhayati dari generasi ke generasi. Dalam proses ini, maka emosi, bukan akal sehat yang menguasai penentuan sikap mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, serta bagaimana bersikap terhadap *outgroup*.

Selanjutnya, Lippman (1922) merujuk stereotip sebagai 'gambar dalam kepala'. Stereotip merupakan representasi kognitif pada kelompok lain yang memengaruhi perasaan pada anggota kelompok tersebut. Hewstone dan Brown (1986), mengemukakan ada tiga aspek dalam stereotip sebagai representasi mental yaitu: Pertama, seringkali individu dikategorikan berdasarkan karakteristik yang dapat diidentifikasi secara mudah seperti jenis kelamin atau etnis. Kedua, seperangkat atribut dianggap ada untuk semua anggota kategori tersebut. Lalu ketiga, seperangkat atribut dianggap ada untuk individu anggota kategori tersebut.

Vassiliou (1972) membedakan antara stereotip normatif dan non-normatif yang dibentuk oleh anggota sebuah *ingroup* yang pernah melakukan kontak dengan *outgroup*. Normatif stereotip adalah norma kognitif untuk berpikirmengenai kelompok manusia berdasarkan informasi yang diperoleh dari pendidikan, media massa, dan/atau peristiwa sejarah. Non-normatif stereotip, sebaliknya, sifatnya proyektif seperti anggota kelompok mulai berpikir mengenai kelompok lain sebagai 'seperti kita'. Dalam diri setiap individu terdapat stereotip normatif dan non-normatif yang memengaruhi kultur subjektifnya. Adapun unsur-unsur terpenting dari kultur subjektif yang disusun oleh Triandis adalah: kategorisasi (konsep), evaluasi, asosiasi dan struktur kognitif elementer, keyakinan atau percaya, sikap, stereotip, harapan, norma, ideal, peranan, tugas, dan nilai-nilai. Dari keduabelas unsur itu, Triandis berpendapat bahwa stereotip adalah konsep sentral, sedangkan kategorisasi merupakan unsur dasar lain yang penting (Warnaen, 2002 : 56, dalam Sarlito's Site).

Sementara itu, dengan masih tetap mengutip Triandis, Warnaen mensinyalir bahwa seperti halnya di Indonesia, sampai permulaan tahun 1960-an berbagai studi yang mencari, mengukur dan menyajikan stereotip, jarak sosial dan hal-hal lain yang serupa, dianggap akan meningkatkan konflik. Baru pada akhir tahun 1960, orang mulai sadar bahwa konflik tidak bisa direduksi dengan tidak menghiraukannya, melainkan dengan jalan mempelajari, menganalisis dan memahaminya. Sekarang sudah waktunya, untuk menghadapi masalah perbedaan kultur secara terbuka. Penelitian Warnaen mengenai 'Stereotip Etnis ke Konflik Etnis', dipicu oleh kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multietnik (Koentjaraningrat, 1969) dan bahwa saling curiga bisa menghambat integrasi (Koentjaraningrat, 1976). Selain itu ia mengutip Triandis (1972) yang mengatakan bahwa: "Sebagian besar konflik antargolongan yang telah terjadi diakibatkan oleh kultur subyektif yang berbeda-beda" (Warnaen, 2002: 52).

Yang menarik dari hasil penelitian di atas adalah bahwa secara umum bangsa Indonesia distereotipkan sebagai masyarakat yang mempunyai beberapa sifat yang baik, tetapi dalam kenyataannya justru tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Misalnya yang terjadi di IPDN, ditemukan fakta bahwa tradisi kekerasan digunakan sebagai cara untuk mendidik calon aparat pemerintahan. Semakin banyak informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kondisi dalam IPDN tersebut, memunculkan stereotip bahwa komunitas di dalamnya terdiri atas orang-orang yang kasar, emosional, agresif, cepat tersinggung, dan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.

Stereotip seperti ini digunakan oleh berbagai kalangan dalam menilai dan berkomentar atas kasus-kasus yang terjadi di IPDN. Stereotip ini kemudian sangat mungkin berkembang menjadi prasangka. Masyarakat mulai berprasangka bahwa tradisi-tradisi yang dilakukan dalam komunitas IPDN dinilai sebagai suatu hal yang melanggar normatif. Tapi justru

argumen-argumen yang dijadikan dasar menilai kasus IPDN tidak sekedar berkaitan dengan norma-norma yang semestinya ada dalam suatu komunitas. Sehingga bisa dikatakan bahwa stereotip normatif dan non-normatif digunakan oleh *outgroup* dalam menilai kasus di IPDN.

Metode

Dalam mengkritisi pemberitaan kasus IPDN menurut paradigma kritikal (Adorno & Horkheimer, 1972), media mendukung tatanan sosial yang sudah mapan dengan bertindak sebagai sarana kontrol sosial dan dengan demikian melakukan legitimasi status quo. Penggambaran tentang masyarakat oleh media cenderung meminimalisir pentingnya konflik sosial dan dengan cara demikian menjamin dan mempertahankan status quo sosial dan politik (Sunarwinadi, 2007 : 4).

Menurut pandangan Gramsci (1971), semua institusi saling berinteraksi dan tergantung satu sama lain dalam keseluruhan bentuk sosial. Interaksi ini ditafsirkan melalui "*common sense*" (akal sehat), yaitu asumsi bersama dari orang-orang yang hidup dalam formasi sosial tersebut. *Common sense* bertindak sebagai ideologi yang hegemonik, yang mengikat masyarakat manapun, tetapi selalu dikontrol dengan berbagai cara oleh sistem kerja internalnya.

Althusser (1971) meneruskan pemikiran Gramsci, menyatakan bahwa negara mempertahankan kekuasaannya tidak saja melalui aparat negara yang represif seperti tentara dan polisi, tetapi juga melalui aparat ideologi negara seperti sistem hukum, institusi pendidikan, agama, dan media. Foucault (1977) meneruskan lebih jauh pemikiran Althusser, dengan berpendapat bahwa setiap interaksi melibatkan kekuasaan yang biasanya menunjang struktur kekuasaan yang ada. Pemikiran Gramsci tentang *common sense* merupakan alat untuk mewujudkan kekuasaan tersebut.

Dalam kenyataannya kekuasaan kerap digunakan untuk memainkan realitas yang ada, guna memaksakan dan memelihara suatu

realitas subyektif agar dapat diterima menjadi realitas obyektif. Oleh karena itu, perlu kiranya pandangan kritikal digunakan dalam upaya memahami konflik antarbudaya di IPDN dan perang wacana di media. Berikut

tipologi teori kritis dalam komunikasi menurut Dennis K. Mumby dalam bukunya berjudul *Modernism, Postmodernism, and Communication Studies: A Reading of an Ongoing Debate* (1997):

Tabel 3. Tipologi Teori Kritis dalam Komunikasi

Modern		Postmodern	
Positivism	Interpretive	Critical (Structural)	PostStructural
Discourse of representation	Discourse of understanding	Discourse of suspicion	Discourse of vulnerability
Pemisahan antara peneliti dan dunia secara tajam. Realita di luar peneliti dan direpresentasikan melalui bahasa.	Pemisahan antara peneliti dan dunia tidak tajam.	Fokus pada struktur-struktur sosial opresif yang dianggap ada, bertahan dan disembunyikan dari kesadaran orang. Bersifat sangat teoritis.	Tidak ada makna sentral atau struktur nyata objektif. Struktur opresif bersifat sementara. Terdapat perjuangan antara gagasan-gagasan dan kepentingan-kepentingan yang cair, dan bukan ideologi-ideologi monolitik. Bersifat anti teori.
Semiotika: sebagaimana resepsi dan produksi pesan.	Simbolik interaksionisme, konstruksi sosial, interpretasi, budaya.	Marxisme (Marx, Althusser, Gramsci). Neo-Marxisme (Frankfurt School). Feminisme.	Cultural studies, Michel Foucault, Feminisme.

(Sumber: Stephen W. Littlejohn, 2002 : 208-209)

Setelah itu *item* berita yang telah dipilih mengenai kasus kekerasan di IPDN dilakukan, kemudian dianalisis dengan pendekatan dan cara yang pernah digunakan oleh Pan dan Kosicki (dalam Eriyanto, 2002 : 251-266). Analisis *framing* dari Pan dan Kosicki dipilih atas pertimbangan bahwa cara-cara yang pernah mereka lakukan lebih tepat dan lebih luas dalam menganalisis setiap bagian dari isi teks media, karena memunculkan banyak "*framing device*" yang bisa digali dari keempat struktur analisisnya, yaitu: sintaksis (berkaitan dengan skema teks antara lain *headline*, *lead*,

latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, dan penutup), skrip (berkaitan kelengkapan teks yaitu *who*, *what*, *whom*, *when*, *where*, *why*, dan *how*), tematik (berkaitan detail, maksud, nominalisasi, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti, paragraf, proposisi, kalimat, dan hubungan antarkalimat), dan retorik (berkaitan dengan leksikon, grafis, metafora, pengandaian, kata, idiom, gambar, foto, dan grafis).

Subyek penelitian yaitu berita-berita mengenai kasus kekerasan di IPDN pada situs Internet Tempo

(www.tempointeraktif.com). Tempo dipilih sebagai subyek penelitian dengan pertimbangan bahwa institusi ini pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru sebelumnya, yaitu dengan 'dibredel' alias dibekukan usaha

penerbitannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana Tempo mengemas kasus kekerasan di IPDN, atau bagaimana Tempo memberitakan penyimpangan yang dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan milik pemerintah ini.

Hasil dan Pembahasan Framing Teks Media

Tabel 4. Framing Device Kasus Kekerasan di IPDN

Sintaksis	Skrip	Tematik	Retoris
<ul style="list-style-type: none"> – Headline: Portal Kekerasan di IPDN – Latar informasi: meninggalnya Cliff Muntu mahasiswa IPDN. – Kutipan sumber: karikatur karya Imam Yunni yang menggambarkan lembaga pendidikan IPDN layaknya sebuah ring tinju. 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Who</i>: Wicaksono – <i>What</i>: menyindir kampus calon pejabat pemerintah daerah yang mencatat rekor kekerasan tertinggi di Indonesia. – <i>Whom</i>: masyarakat. – <i>When</i>: pada saat mahasiswa menerima pendidikan di IPDN. – <i>Where</i>: di IPDN. – <i>Why</i>: karena lembaga pendidikan seperti IPDN mestinya bukan tempat penganiayaan. – <i>How</i>: dengan cara menyatakan pendapat disertai ilustrasi gambar. 	<ul style="list-style-type: none"> – Isi pesan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa telah terjadi kasus kekerasan di IPDN. – Gaya penyampaian pesan menggunakan gaya bahasa informal, dan cenderung menggunakan gaya bicara sehari-hari untuk menyindir. 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Setting</i>: sebuah ring tinju bertuliskan IPDN. – Gambar seorang mahasiswa senior IPDN diibaratkan petinju berbadan besar dengan topeng dan sarung tinju yang siap meng-KO mahasiswa junior IPDN. – Seorang mahasiswa junior yang nampak babak belur setelah ditinju oleh seniornya. – Sederet antrian mahasiswa junior IPDN yang siap menjadi sasaran tinju dari seniornya.
<ul style="list-style-type: none"> – Headline: Portal Pembekuan Sementara IPDN 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Who</i>: Wicaksono – <i>What</i>: mengutip pernyataan 	<ul style="list-style-type: none"> – Isi pesan dimaksudkan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Setting</i>: lembaga pendidikan IPDN yang dibekukan

<ul style="list-style-type: none"> – Latar informasi: pembekuan semua kegiatan internal mahasiswa atau wahana bina praja di kampus IPDN. – Kutipan sumber: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan seluruh kegiatan di dalam ataupun di luar kampus dibekukan, IPDN tak boleh menerima praja baru, dan meminta pengawasan seluruh kegiatan praja dilakukan lembaga secara penuh. 	<p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pembekuan semua kegiatan internal mahasiswa atau wahana bina praja di kampus IPDN.</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Whom</i>: masyarakat. – <i>When</i>: setelah kasus kematian Cliff Muntu. – <i>Where</i>: di IPDN. – <i>Why</i>: karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membekukan dan menghentikan sementara kegiatan di IPDN. – <i>How</i>: dengan cara menyatakan pendapat. 	<p>menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah pembekuan semua kegiatan internal mahasiswa atau wahana bina praja di kampus IPDN.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gaya penyampaian pesan menggunakan gaya bahasa informal, dan cenderung menggunakan gaya bicara sehari-hari untuk menyindir 	<p>semua kegiatan internal mahasiswa atau wahana bina praja dan pembekuan proses penerimaan mahasiswa untuk sementara.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lembaga pendidikan IPDN diibaratkan sebagai sebuah sasana pembentukan petinju, dengan mengandaikan mahasiswa lulusannya akan mengikuti jejak Chris Jhon sebagai juara tinju.
<p>– Headline: Profesor Lexie Ikut Apel Pagi di Kampus IPDN</p> <ul style="list-style-type: none"> – Latar informasi: kehadiran Profesor Lexie pada apel pagi di IPDN setelah pemeriksaan dirinya terkait kematian Cliff Muntu. – Kutipan sumber: Profesor Lexie yang menyatakan dirinya telah menandatangani berita acara pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Who</i>: Ahmad Fikri – <i>What</i>: kemunculan Profesor Lexie di IPDN setelah dinyatakan terkait dengan penyuntikan formalin ke dalam tubuh praja Cliff Muntu. – <i>Whom</i>: masyarakat. – <i>When</i>: apel pagi di IPDN. – <i>Where</i>: di IPDN. – <i>Why</i>: karena walaupun Profesor Lexie 	<ul style="list-style-type: none"> – Isi pesan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Profesor Lexie terkait dengan penyuntikan formalin pada jenazah praja Cliff Muntu, namun masih bebas berkeliaran. – Gaya penyampaian pesan menggunakan gaya bahasa formal, dan cenderung menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Setting</i>: apel pagi di IPDN. – Dalam tulisan digambarkan bagaimana seorang terdakwa kasus kematian praja Cliff Muntu, Profesor Lexie, dapat dengan tenang mengikuti apel pagi di IPDN.

<p>pemeriksaan sehingga diperbolehkan datang ke IPDN.</p>	<p>sudah dinyatakan terkait dengan kasus penyuntikan formalin pada jenazah Cliff Muntu, tapi masih bisa hadir pada apel pagi di IPDN.</p>	<p>standar gaya penulisan jurnalistik.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Headline: Kuburan di IPDN akan Dibongkar – Latar informasi: upaya untuk mencari bukti atas tindak penyimpangan sistem pendidikan dan manajemennya. – Kutipan sumber: Ketua Tim Evaluasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryass Rasyid yang menyatakan akan membongkar kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kepala Bidang Pengasuhan IPDN Ilhami Bisri mengatakan kekerasan itu ciptaan para praja sendiri, dan seorang pegawai IPDN yang enggan 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>How:</i> menyampaikan informasi disertai dengan keterangan dari Profesor Lexie. – <i>Who:</i> Ahmad Fikri & C. Aminudin – <i>What:</i> menyatakan bahwa ada kuburan di lokasi kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat. – <i>Whom:</i> masyarakat. – <i>When:</i> ketika ditemukan ada kuburan di lokasi kampus IPDN. – <i>Where:</i> di IPDN. – <i>Why:</i> karena curiga ada mahasiswa korban tindak kekerasan telah dikuburkan di kampus IPDN. – <i>How:</i> dengan cara menyatakan uraian fakta yang disertai dengan pendapat tiga orang narasumber. 	<ul style="list-style-type: none"> – Isi pesan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa ada kuburan di kampus IPDN, yang diduga telah digunakan untuk menguburkan mahasiswa korban tindak kekerasan di IPDN. – Gaya penyampaian pesan menggunakan gaya bahasa formal, dan cenderung menggunakan standar gaya penulisan jurnalistik.
<ul style="list-style-type: none"> – <i>Setting:</i> menyelidiki kasus tindak kekerasan di IPDN. – Dalam tulisan digambarkan bagaimana masing-masing narasumber mentafsirkan bukti tindak kekerasan di IPDN baik dalam bentuk aktivitas (kegiatan ekstrakurikuler drum band Abdi Gita Praja), maupun dengan ditemukannya bukti fisik lokasi kuburan di kampus IPDN. 		

disebutkan namanya membenarkan adanya kuburan di IPDN, tapi dia membantah ada praja yang dikubur di tempat itu.

-
- | | | | |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – Headline: Komisi Nasional HAM Siap Kirim Staf Mengajar di IPDN – Latar informasi: meninggalnya Cliff Muntu mahasiswa IPDN. – Kutipan sumber: Zumrotin Susilo, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa mahasiswa perlu mendapat pelajaran hak asasi manusia dan alumnus IPDN yang terjun ke masyarakat harus bisa melayani warga dengan hati, bukan dengan tendangan, dan sistem pendidikan di IPDN sama sekali tak berwawasan hak asasi manusia. | <ul style="list-style-type: none"> – <i>Who</i>: Pramono – <i>What</i>: menyatakan bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan di IPDN, yang tidak memiliki wawasan mengenai hak asasi manusia. – <i>Whom</i>: masyarakat. – <i>When</i>: kampus IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kembali menjadi perhatian karena tewasnya praja asal Sulawesi Utara, Cliff Muntu. – <i>Where</i>: di IPDN. – <i>Why</i>: karena ada anggapan bahwa kampus IPDN telah menerapkan kekerasan yang tidak manusiawi dalam mendidikan para mahasiswanya. – <i>How</i>: dengan cara menyatakan berupa uraian fakta yang disertai dengan pendapat seorang narasumber. | <ul style="list-style-type: none"> – Isi pesan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa sistem pendidikan di IPDN tidak memiliki wawasan mengenai hak asasi manusia. – Gaya penyampaian pesan menggunakan gaya bahasa formal, dan cenderung menggunakan standar gaya penulisan jurnalistik. | <ul style="list-style-type: none"> – <i>Setting</i>: sistem pendidikan di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat. – Dalam tulisan digambarkan seorang narasumber dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mengomentari kasus tindak kekerasan di IPDN yang dinilai salah dengan telah menerapkan kekerasan dalam sistem pendidikannya. |
|---|--|---|--|
-

<ul style="list-style-type: none"> – Headline: Masalah Keuangan IPDN Sangat Tertutup – Latar informasi: investigasi dari Tim Evaluasi mengenai pengelolaan keuangan di kampus IPDN. – Kutipan sumber: Ketua Tim Evaluasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryaas Rasyid mengeluhkan ketertutupan pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan kedinasan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Who</i>: Choirul Aminuddin. – <i>What</i>: pengelolaan manajemen keuangan di IPDN yang dinilai tertutup. – <i>Whom</i>: masyarakat. – <i>When</i>: pada saat Tim Evaluasi melakukan penyelidikan pada manajemen pengelolaan keuangan di IPDN. – <i>Where</i>: di IPDN. – <i>Why</i>: karena IPDN dinilai tidak terbuka, tidak jujur, dan tidak transparan dalam manajemen pengelolaan keuangan umumnya dan khususnya pada pelelangan barang dan tender pakaian mahasiswa. – <i>How</i>: dengan cara menyatakan berupa uraian fakta yang disertai dengan pendapat seorang narasumber. 	<ul style="list-style-type: none"> – Isi pesan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa ada yang salah dalam manajemen pengelolaan keuangan di IPDN. – Gaya penyampaian pesan menggunakan gaya bahasa formal, dan cenderung menggunakan standar gaya penulisan jurnalistik. 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Setting</i>: sistem manajemen pengelolaan keuangan di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat. – Dalam tulisan digambarkan Ketua Tim Evaluasi merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh pihak IPDN berkaitan dengan investigasi manajemen pengelolaan keuangan kampus.
---	---	---	---

Analisis Framing Teks Media

Sintaksis dalam *framing* teks media yang telah dilakukan oleh Tempo, ada kecenderungan bahwa *headline* yang ditampilkan umumnya lebih pada sisi negatif pemberitaan kasus kekerasan di IPDN. Latar informasi pada umumnya fokus pada peristiwa

kematian praja Cliff Muntu, setelah itu baru dikembangkan pada latar informasi lainnya yang saling berkaitan. Sedangkan untuk kutipan sumber, diambil dari pernyataan-pernyataan narasumber yang lebih banyak melihat sisi negatif dari kasus kekerasan di IPDN.

Skrip yang dimunculkan dalam framing teks media yang telah dilakukan oleh Tempo ada kesan memang memojokkan pihak IPDN. Hal ini terlihat dari penekanan unsur-unsur berita, yaitu: *who* adalah wartawan Tempo, *what* berkaitan dengan hal-hal negatif yang terjadi seputar kasus kekerasan di IPDN, *whom* disampaikan agar masyarakat tahu mengenai kasus kekerasan ini, *when* mulai dari kasus kematian praja Cliff Muntu sampai menyentuh pada hal-hal terkait pada pengelolaan sistem pendidikan di IPDN, *where* semuanya terjadi di IPDN, *why* karena media Tempo menilai bahwa ada yang salah dengan sistem pendidikan milik pemerintah ini, dan *how* dengan menuliskan berita yang mengungkap fakta seputar kasus kekerasan di IPDN disertai dengan ilustrasi gambar bila perlu.

Tematik berkaitan dengan isi pesan yang ingin disampaikan oleh Tempo berdasarkan narasumber yang dipilih untuk memperkuat informasi yang disampaikan. Di sini ada kecenderungan bahwa narasumber dari pihak IPDN nampak mempersepsikan kasus kekerasan di sana sebagai suatu hal yang dilakukan oleh para mahasiswa, atau mereka sendiri sebagai pengelola lembaga pendidikan tidak terlibat sama sekali. Selain itu, pihak IPDN kelihatannya tidak melihat ada yang salah dengan kebudayaan yang terwujud dalam sistem pendidikan yang mereka selenggarakan.

Namun hal berbeda disampaikan oleh para narasumber dari luar IPDN. Umumnya mereka menyatakan bahwa ada yang salah dengan kebudayaan sistem pendidikan di IPDN. Sebuah sistem pendidikan diidealkan oleh para narasumber di luar IPDN, sebagai suatu kebudayaan yang penuh tata krama, mendidik dengan santun, dan menghindari unsur-unsur kekerasan. Sehingga, mereka menilai bahwa apa yang terjadi di IPDN merupakan suatu bentuk penyimpangan dari kebudayaan yang mereka miliki.

Retoris berkaitan dengan *setting* yang digunakan untuk menekankan pesan apa yang ingin disampaikan oleh Tempo, ada kecenderungan pemilihan *setting* yang

memojokkan pihak IPDN. Hal-hal yang sifatnya negatif lebih banyak ditampilkan untuk menambah kesan bahwa komunitas IPDN berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ditambah dengan ilustrasi gambar, semakin memperburuk pencitraan IPDN di media. Paling tidak dari gambar yang ditampilkan Tempo, memperlihatkan bahwa kebudayaan di IPDN lebih buruk dari kebudayaan masyarakat umum.

Menurut Kim (1979 : 435), kebudayaan merupakan kumpulan pola-pola kehidupan yang dipelajari oleh sekelompok manusia tertentu dari generasi-generasi sebelumnya dan akan diteruskan ke generasi mendatang; kebudayaan tertanam dalam diri individu sebagai pola-pola persepsi yang diakui dan diharapkan oleh orang-orang lainnya dalam masyarakat. Ditegaskan lagi oleh Samovar (et. al., 1981 : 25) bahwa sebagai suatu teladan bagi kehidupan, kebudayaan mengkondisikan manusia secara tidak sadar menuju cara-cara khusus bertingkah laku dan berkomunikasi.

Kalau ingin dikaji lebih dalam lagi, Dood (1982 : 27) melihat kebudayaan sebagai konsep yang bergerak melalui suatu kontinum. Mulai dari kognisi dan keyakinan mengenai orang-orang lain dan diri sendiri, termasuk nilai-nilai, sampai dengan pola-pola tingkah laku. Adat kebiasaan (*norms*) dan praktek-praktek kegiatan (*activities*) merupakan bagian dari norma-norma dan keyakinan-keyakinan, yakni model-model perilaku yang sudah diakui dan diharuskan. Pola tingkah laku yang paling umum yaitu bahasa (linguistik), dalam hal penggunaan pesan-pesan verbal dan nonverbal mencerminkan satu segi kehidupan sehari-hari. Anggota-anggota kebudayaan pun dapat diidentifikasi serta mereka sendiri dapat melihat dirinya sebagai anggota dari suatu kelompok yang memiliki suatu kebudayaan. Singkatnya, kebudayaan merupakan pola hidup yang bersifat mencakup segalanya. Selain itu kebudayaan bersifat kompleks, abstrak dan merasuki semua aspek dan segi kehidupan anggotanya.

Salah satu fungsi kebudayaan ialah sebagai penyaring yang sangat selektif bagi manusia

dalam menghadapi dunia luar. Kebudayaan menentukan apa yang perlu diperhatikan atau sebaliknya perlu dihindari oleh manusia, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada bagaimana orang berpersepsi. Persepsi merupakan proses internal yang dilalui individu dalam menyeleksi, mengevaluasi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Melalui persepsi, menciptakan stabilitas, struktur dan makna bagi lingkungan. Orang belajar untuk menamai dan mengembangkan kategori-kategori di sekeliling, salah satunya dengan stereotip dan prasangka.

Stereotip dan prasangka merupakan konsep yang saling berhubungan dan biasanya terjadi bersama-sama. Stereotip merupakan suatu keyakinan yang terlalu digeneralisir, terlalu dibuat mudah, disederhanakan atau dilebih-lebihkan mengenai suatu kategori atau kelompok orang tertentu (Samovar, Porter, Jain, 1981, dalam Sunarwinadi, 1999). Sedangkan prasangka dirumuskan sebagai sikap kaku terhadap suatu kelompok manusia, berdasarkan keyakinan atau prakonsepsi yang salah. Seseorang yang mempunyai stereotip tertentu tentang suatu kelompok juga cenderung untuk mempunyai prasangka terhadap kelompok tersebut. Baik stereotip maupun prasangka merupakan hal yang dipelajari, salah satunya melalui media massa.

Menurut Dodd (1982 : 27, dalam Sunarwinadi, 2007), secara keseluruhan media massa memiliki efek sebagai berikut: Pertama, media massa menjalankan fungsi memberi kesadaran, membangkitkan minat terhadap suatu peristiwa atau gagasan melalui penerangan langsung tentang eksistensinya. Kedua, media massa mengembangkan agenda, dalam arti menjaring perhatian khalayak akan topik-topik kemasyarakatan yang dianggapnya penting. Ketiga, media massa berperan sebagai pendorong perubahan, dengan menciptakan iklim yang memudahkan terjadinya perubahan. Keempat, media massa bekerja bersama-sama dengan dan melalui sarana-sarana antarpribadi, hal mana tentunya tergantung pada situasi dan kondisi khalayaknya. Kelima, dibandingkan

dengan komunikasi antarpribadi, media massa kurang besar pengaruhnya dalam persuasi untuk pengambilan keputusan, terutama dalam masyarakat yang belum maju atau sedang berkembang. Keenam, media massa dapat merangsang timbulnya desas-desus, sebab dengan sifat beritanya yang harus singkat, dan padat, kadang-kadang malah menimbulkan ketidakjelasan dan keragu-raguan pada khalayak.

Media Memelihara Stereotip

Belakangan ramai media massa memberitakan dan mengungkit kembali kasus-kasus kecelakaan dan kematian yang pernah terjadi di IPDN. Gelombang pro dan kontra atas pembubaran lembaga ini pun semakin banyak bermunculan di media, yang berakibat pada dinonaktifkannya kegiatan belajar-mengajar di kampus IPDN ini. Berbagai pihak berebut mengeluarkan opininya, yang belum tentu mereka tahu apa yang diperjuangkan.

Dalam masyarakat yang semakin individual dan heterogen ini, media memainkan peranan penting sebagai salah satu atau bahkan satu-satunya sumber sosialisasi dari realitas sosial di masyarakat. Sementara realitas yang disampaikan oleh media berasal dari sumber-sumber komunikasi yang secara nyata mengedepankan realitas subjektifnya. Alih-alih membentuk realitas obyektif di masyarakat, media malahan memelihara dan menginstitutionalkan kenyataan subjektif berdasarkan stereotip yang berkembang di masyarakat, dan bukan yang obyektif; kenyataan sebagaimana yang dipahami dalam kesadaran individu dan bukan kenyataan sebagaimana yang ditentukan secara kelembagaan (masyarakat).

Dalam pandangan Berger dan Luckmann, masyarakat mesti dipahami dalam suatu proses dialektis yang berlangsung secara terus menerus dan terdiri dari tiga *moment*, yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Dialektika ketiga momen ini berlangsung tidak dalam proses yang terpisah satu sama lain, tapi

dia berlangsung dalam proses bersamaan dan saling membentuk. Sehingga, suatu fakta sosial yang terlahir dalam suatu masyarakat belum serta-merta menjadi milik semua anggota masyarakat. Tapi fakta sosial berada pada tahap pra-disposisi (kecenderungan) ke arah sosialitas, melalui proses sosialisasi kemudian baru menjadi milik anggota masyarakat. Sosialisasi didefinisikan sebagai pengimbasan individu secara komprehensif dan konsisten ke dalam dunia obyektif suatu masyarakat atau satu sektornya.

Berger membagi sosialisasi menjadi dua yaitu 'sosialisasi primer' dan 'sosialisasi sekunder'. *Primary socialization is the first childhood one through which we become members of society. Secondary socialization is subsequent and inducts the person into a new sector* (Berger & Luckmann, 1979 : 149-157). Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama yang dialami individu dalam masa kanak-kanak, yang dengan itu ia menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder adalah setiap proses berikutnya yang mengimbas individu yang sudah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru dunia obyektif masyarakatnya.

Dalam sosialisasi primer relatif tidak ada masalah identifikasi. *Significant others* yang berpengaruh untuk membentuk realitas sosial seorang anak, tidak dapat dipilih. Masyarakat menyediakan sekelompok *significant others* tertentu bagi sosialisasi anak yang harus ia terima sebagaimana adanya tanpa kemungkinan untuk memilih. Karena itulah maka dunia yang diinternalisasikan dalam sosialisasi primer jauh lebih kuat tertanam dalam kesadaran dibandingkan dengan dunia-dunia yang diinternalisasikan dalam sosialisasi sekunder.

Sosialisasi primer menciptakan di dalam kesadaran anak suatu abstraksi yang semakin tinggi dari peranan-peranan dan sikap orang lain tertentu ke peranan-peranan dan sikap-sikap pada umumnya. Abstraksi berbagai peranan dan sikap orang yang secara kongkrit berpengaruh dinamakan orang lain pada umumnya (*generalized others*).

Pembentukannya dalam kesadaran berarti bahwa individu sekarang mengidentifikasi dirinya tidak hanya dengan orang lain yang kongkrit, melainkan dengan orang lain pada umumnya.

Berkat identifikasi yang digeneralisasikan inilah maka identifikasi dirinya sendiri memperoleh kestabilan dan kesinambungan. Sekarang ia mempunyai tidak hanya suatu identitas tertentu dengan *significant others* yang ini atau yang itu, tetapi suatu identitas secara umum, yang secara subyektif dipahami sebagai tetap tak berubah, tak peduli ada *significant others* atau tidak. *Significant other* bukanlah satu-satunya yang dapat mempertahankan kenyataan subyektif, walaupun dia punya peran sentral. Disamping itu *significant others* juga merupakan agen utama untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya.

Sosialisasi sekunder adalah internalisasi sejumlah 'sub-dunia' kelembagaan atau yang berlandaskan lembaga. Karena itu lingkup jangkauan dan sifatnya ditentukan oleh kompleksitas pembagian kerja dan distribusi pengetahuan dalam masyarakat yang menyertainya. Sudah tentu, pengetahuan yang relevan secara umum pun bisa didistribusikan secara sosial, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah 'pengetahuan khusus' sebagai pengetahuan yang timbul sebagai akibat pembagian kerja dan yang pengembangan-pengembangannya ditentukan secara kelembagaan.

Dengan melupakan sejenak dimensi-dimensi lain, dapat dikatakan bahwa sosialisasi sekunder adalah proses memperoleh pengetahuan khusus sesuai dengan peranannya (*role-specific knowledge*), dimana peranan-peranan secara langsung atau tidak langsung berakar dalam pembagian kerja. Ada beberapa alasan untuk membenarkan definisi sempit ini, tetapi sama sekali belum mencakup seluruh persoalannya. Sosialisasi sekunder memerlukan proses memperoleh kosa kata khusus berdasarkan peranan, yang berarti antara lain internalisasi bidang-bidang semantik yang menstrukturkan penafsiran dan perilaku rutin di

dalam suatu wilayah kelembagaan. Dalam waktu yang bersamaan diperlukan juga 'pemahaman tersirat', evaluasi-evaluasi dan pewarnaan afektif dari bidang-bidang semantik itu. Sub-dunia yang diinternalisasikan dalam sosialisasi sekunder pada umumnya merupakan kenyataan-kenyataan parsial, berbeda dengan 'dunia-dasar' yang diperoleh dalam sosialisasi primer. Walaupun demikian, sub-dunia itu pun merupakan kenyataan yang sedikit banyaknya kohesif, bercirikan komponen normatif dan afektif maupun kognitif.

Selain itu, sub-dunia itu pun memerlukan setidaknya-tidaknya dasar perangkat legitimasi yang sering diiringi simbol-simbol ritual atau material. Sifat sosialisasi sekunder seperti itu tergantung pada status perangkat pengetahuan yang bersangkutan di dalam universum simbolis secara keseluruhan. Proses-proses formal dalam sosialisasi sekunder ditentukan oleh masalah dasarnya: ia selalu mengandaikan suatu proses sosialisasi primer yang mendahuluinya; artinya ia berurusan dengan suatu diri yang sudah terbentuk dan suatu dunia yang sudah diinternalisasi.

Berdasarkan sosialisasi primer dan sekunder tersebut, ada dua cara membedakan bagaimana memelihara dan mentransformasikan kenyataan, yaitu cara pemeliharaan rutin dan cara pemeliharaan dalam keadaan krisis. Hal pertama adalah dimaksudkan untuk mempertahankan kenyataan yang sudah diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan yang disebut belakangan dimaksudkan untuk mengatasi situasi-situasi krisis. Keduanya melibatkan proses-proses sosial yang pada dasarnya sama, meskipun perlu dicatat adanya beberapa perbedaan.

Sosialisasi selalu berlangsung dalam konteks suatu struktur sosial tertentu. Tidak hanya isinya, tetapi juga tingkat 'keberhasilannya', mempunyai kondisi dan konsekuensi sosial kultural. Keberhasilan yang maksimal dalam sosialisasi agaknya akan terjadi dalam masyarakat-masyarakat dengan pembagian kerja yang masih minim. Sosialisasi

dalam kondisi-kondisi seperti itu menghasilkan identitas yang secara sosial sudah didefinisikan lebih dulu dan garis-garis besarnya sudah ditetapkan dengan sangat seksama. Karena tiap individu dihadapkan pada program kelembagaan yang pada pokoknya sama bagi kehidupannya dalam masyarakat, maka segenap kekuatan tatanan kelembagaan dikerahkan dengan bobot yang kurang lebih sama untuk memengaruhi tiap individu, sehingga menghasilkan suatu kemasifan yang memaksa bagi kenyataan obyektif yang hendak diinternalisasikan.

Sosialisasi sekunder melalui media merupakan suatu proses pembentukan sub-dunia di masyarakat yang lebih bersifat memaksa atau meminjam istilah Foucault yaitu mendisiplinkan pengetahuan dengan kekuasaan. Michel Foucault dalam *The History of Sexuality* (Best and Kellner, 1991), mengkritisi bahwa pengetahuan sesuai pada jamannya, dan pengetahuan merupakan produk pemaksaan dari orang-orang yang memiliki pengetahuan kepada mereka yang awam. Sehingga dalam kasus IPDN dapat dikatakan bahwa media memelihara dan menginstitutionalkan stereotip yang berkembang di masyarakat dengan menghiraukan realitas sesungguhnya (obyektif) yang selama ini ada dalam komunitas IPDN.

Fakta sosial merupakan unsur kunci dari kenyataan subyektif dan berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Realitas subyektif dibentuk oleh proses sosial dan tipe-tipe realitas merupakan produk sosial. Ia tidak berdiri sendiri melainkan sangat dipengaruhi oleh relasi berbagai unsur dalam kehidupan masyarakat. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau dibentuk ulang oleh hubungan sosial.

Bangunan dasar sebuah realitas subyektif adalah fakta sosial. Fakta sosial merupakan sekumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan pada suatu waktu tertentu berdasarkan pada kebenaran yang sangat relatif sifatnya. Seseorang memperoleh realitasnyanya dari hasil pengamatan apa yang ada di sekitarnya, apa yang membuatnya menjadi

sama dan berbeda dengan orang-orang di sekelilingnya.

Ketika fakta sosial diangkat ke media, tentulah tidak mungkin untuk menampilkannya secara utuh karena adanya keterbatasan konsep dan teknis. Hal-hal apa saja yang dianggap penting untuk disampaikan dan bagaimana penataan ulang (rekonstruksi) dari fakta-fakta sosial tersebut, akan berpengaruh pada sudut pandang sumber pesan. Sebaliknya bagaimana fakta sosial disajikan akan juga berpengaruh pada pemahaman, sikap dan perilaku penerima.

Media dalam hal ini merupakan salah satu wadah yang melembagakan realitas subyektif supaya dapat diterima oleh setiap diri individu yang dituju. Dalam kaitan dengan penggambaran kasus IPDN di media, yang kelihatan adalah bahwa media memelihara ciri-ciri kelompok yang diinginkan oleh masyarakat umum. Komunitas IPDN secara keseluruhan digambarkan sebagai kelompok yang tidak lazim karena tradisi-tradisi mereka yang berbeda dengan lembaga pendidikan umum lainnya.

Simpulan

Di samping efek membangkitkan kesadaran pada khalayak, media massa nampaknya mempunyai pengaruh yang tanpa dimaksudkan sebelumnya (*unintentional*). Penayangan media massa secara tidak disengaja atau tanpa maksud justru mempunyai efek yang lebih besar daripada pesan media massa yang memang direncanakan untuk memengaruhi perubahan. Dalam situasi antarbudaya, media dapat menciptakan dan menggambarkan karakter-karakter serta tipe-tipe kebudayaan yang pada akhirnya memengaruhi kepribadian dan tingkah laku khalayaknya.

Kebanyakan orang beranggapan bahwa caranya melakukan persepsi terhadap hal-hal di sekelilingnya adalah satu-satunya yang paling tepat dan benar. Inilah yang dinamakan 'etnosentrisme' yaitu kecenderungan untuk menafsirkan atau menilai kelompok-kelompok orang lain berdasarkan keadaan lingkungan kebudayaan sendiri. Etnosentrisme biasanya

dipelajari pada tingkat ketidaksadaran dan diwujudkan pada tingkat kesadaran. Bahayanya, penilaian yang cenderung mengedepankan etnosentrisme sering kali salah, semena-mena dan tidak ada dasarnya sama sekali.

Untuk memperkuat etnosentrisme, seseorang biasanya mengandalkan stereotip yang meliputi keyakinan mengenai kelompok-kelompok individu berdasarkan pendapat, persepsi, dan sikap yang dibentuk sebelumnya. Stereotip juga dikatakan sebagai 'metode malas dari interaksi', karena dilakukan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman kontak sedikit saja sebelumnya dan pengambilan kesimpulan tentang orang lain dilakukan tanpa susah payah dan relatif cepat.

Selain itu, stereotip merupakan mekanisme untuk pertahanan diri dan sarana untuk mengurangi kegelisahan. Misalnya ketika seseorang mengalami *culture shock*, akan lebih mudah baginya untuk melakukan stereotyping daripada terus menerus menghadapi ketidakpastian. Dibandingkan dengan harus melakukan usaha khusus untuk memahami situasi, maka untuk mengurangi kebingungan seseorang akan menerima informasi yang belum tentu benar.

Sikap dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan strategi untuk mengurangi konflik antarbudaya, berikut ini ada beberapa teknik, kiat dan falsafah yang dapat membantu pengembangan sikap dan keterampilan berkomunikasi, yaitu:

- Mengenali diri sendiri Intinya mengidentifikasi sikap, nilai, pendapat, kecenderungan diri sendiri, dan mengetahui citra diri yang dipersepsikan orang lain. Dengan demikian dapat menentukan apa saja yang dikatakan, juga apa yang didengar dari orang lain katakan.
- Menggunakan kode yang sama Karena makna terletak pada orang dan bukan pada kata-kata, maka untuk meningkatkan komunikasi, seseorang harus mengetahui kode khusus yang digunakan orang lain atau kelompok-kelompok tertentu.

- Jangan terburu-buru ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu menunda penilaian dengan tidak terlalu cepat dalam menarik kesimpulan sebelum orang lain menyatakan seluruh pikiran dan perasaannya, dan memberi waktu yang cukup pada orang lain untuk mencapai tujuan pembicaraannya.
- Memperhitungkan lingkungan fisik dan manusia menyadari lingkungan atau konteks tempat dimana peristiwa komunikasi terjadi. Dengan memperhatikan lingkungan fisik, akan menyadari makna-makna yang dilekatkan oleh macam-macam kebudayaan pada simbol-simbol yang ada, yang berpengaruh pada sikap dan perilaku orang-orang di sekitarnya.
- Meningkatkan keterampilan berkomunikasi hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran proses penyampaian dan penerimaan pesan, seharusnya diperhatikan berdasar pada dampak yang mungkin timbul akibat dari proses tersebut. Karenanya pemilihan topik dan gaya penyampaian pesan perlu disesuaikan dengan siapa berkomunikasi.
- Mendorong umpan balik idealnya dalam sebuah proses komunikasi, bisa mendorong terlaksananya umpan balik. Memahami kuantitas dan kualitas umpan balik berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya.
- Mengembangkan empati ketidakmampuan untuk memahami dan menghargai pandangan dan orientasi orang lain sering kali menghambat komunikasi yang efektif. Oleh karena itu sebaiknya menerima adanya perbedaan dan berusaha untuk menempatkan diri pada posisi orang yang diajak berkomunikasi.
- Mencari persamaan-persamaan di antara kebudayaan-kebudayaan berbeda meskipun diharuskan untuk memahami adanya perbedaan-perbedaan latar belakang sosial budaya yang memengaruhi komunikasi, tetapi dalam banyak hal ternyata persamaan-persamaanlah yang memungkinkan seseorang untuk menjalin hubungan.

Daftar Pustaka

- Aminuddin, Choirul. 2004. *Masalah Keuangan di IPDN Sangat Tertutup*. www.tempointeraktif.com, 19 Juni 2004, diakses 30 April 2007.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. 1979. *The Social Construction of Reality*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Fikri, Ahmad. 16 April 2007. Profesor Lexie Ikut Apel Pagi di IPDN. www.tempointeraktif.com, diakses 30 April 2007.
- Fikri, Ahmad, dan C. Aminudin. 17 April 2007. Kuburan di IPDN Akan Dibongkar. www.tempointeraktif.com, diakses 30 April 2007.
- Gudykunst, William B. & Young Yun Kim (eds). 1992. *Reading on Communicating With Stranger: An Approach to Intercultural Communication*. Boston, Massachusetts: McGraw Hill.
- Gudykunst, William B. and Young Yun Kim. 1997. *Communicating With Stranger: An Approach to Intercultural Communication*. Third Edition. Boston, Massachusetts: McGraw Hill.
- Komnas HAM. 17 Juni 2004. *Empat Tahap Resolusi Konflik*. www.tempointeraktif.com, diakses 23 April 2004.
- Mendatu, Achmanto. 13 Juli 2009. Peranan prasangka dalam konflik antar etnik. <http://psikologi-online.com/peranan-prasangkan-dalam-konflik-antar-etnik>, diakses 2 September 2009.
- Pramono. 18 April 2007. *Komisi Nasional HAM Siap Kirim Staf Mengajar ke IPDN*. www.tempointeraktif.com, diakses 30 April 2007.
- Republika Online. 22 Desember 2003. *Konflik Etnis Pelajaran Berharga*. www.republika.co.id, diakses 23 April 2007.

- Rifai, Agus. 2006. *Perpustakaan dan Pendidikan Multikulturalisme*. www.lspma.blogspot.com/.../benturan-antar-peradaban-ii-ssmuel-p.ht..., diakses 4 September 2009.
- Sarlito'sSite. Juni 2003. *Dari Stereotip Etnis ke Konflik Etnis*. Sarlito.NET.ms, diakses 23 April 2007.
- Simon Fisher, dkk. 17 Juni 2004. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. www.tempo.co.id, diakses 26 April 2007.
- Sunarwinadi, Ilya Revianti. 1999. *Mengusut Benang Kusut Konflik Antarbudaya di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- _____. 2007. *Berita dan Konflik Sosial/Antarbudaya: Pendekatan Teoritik*. Jakarta: Program Pasca Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.
- Surwandono. 24 Januari 2007. *Konflik Poso dan Public Trust*. www.republika.co.id, diakses 26 April 2007.
- Wicaksono. 5 April 2007. *Portal Kekerasan di IPDN*. www.tempointeraktif.com, diakses 30 April 2007.
- _____. 11 April 2007. *Portal Pembekuan Sementara IPDN*. www.tempointeraktif.com, 30 April 2007.
- Wiradi, Gunawan. 17 Oktober 2003. *Konflik Agraria*. www.pustaka-agraria.org/modules/download_gallery/dl.php?file=341, diakses 4 September 2009.